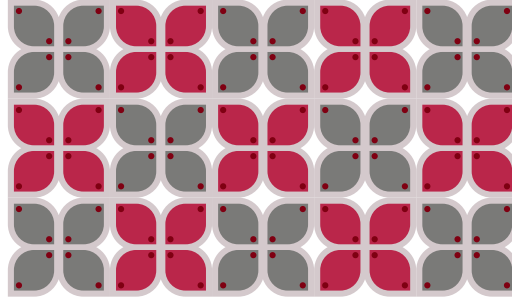


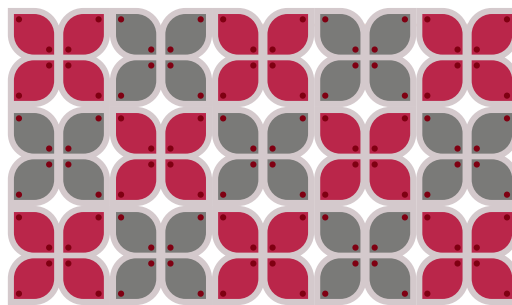
Laporan Tahunan 2022





DAFTAR ISI

- 3** [Tentang SMERU](#)
- 4** [Sambutan Pembina](#)
- 5** [Sambutan Manajemen](#)
- 6** [Yayasan SMERU](#)
- 8** [SMERU dalam Angka](#)
- 9** [SMERU di Internet](#)
- 10** [Momen Penting](#)
- 12** [Sorotan Penelitian](#)
- 22** [Wilayah Kerja SMERU](#)
- 26** [Sorotan Kegiatan](#)
- 30** [Publikasi SMERU](#)
- 32** [Keterlibatan dalam Proses Kebijakan](#)
- 34** [Data & Informasi](#)
- 36** [Jejaring](#)
- 38** [Profil Staf](#)
- 39** [Struktur Organisasi](#)
- 41** [Laporan Keuangan 2021 & 2022](#)



LAPORAN TAHUNAN 2022

The SMERU Research Institute

Laporan Tahunan 2022/SMERU, Editor: Budhi Adrianto, dkk

--Jakarta: The SMERU Research Institute, 2023

--44 p; 27 cm.

ISSN 9 772597 881003

1. Laporan 2. Research

I. Judul II. Author

001.4 –ddc 23

Diterbitkan oleh The SMERU Research Institute
Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330 Indonesia

November 2023



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah secara daring dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web smeru.or.id.

 The SMERU Research Institute

 @SMERUInstitute

 The SMERU Research Institute

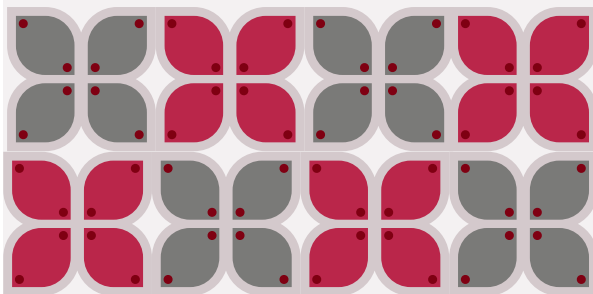
 The SMERU Research Institute

 @smeru.institute

TENTANG SMERU

SMERU adalah sebuah lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan. Ruang lingkup pekerjaan kami mencakup berbagai isu sosial-ekonomi, terutama yang berperspektif kemiskinan dan ketimpangan.

Kami memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman melakukan penelitian yang berfokus pada kemiskinan dan ketimpangan, perlindungan sosial, dan pembangunan manusia di Indonesia. Kami secara aktif berupaya mendorong kebijakan promasyarakat miskin di tingkat nasional dan daerah melalui bukti berbasis hasil penelitian. Kami menerapkan pendekatan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) pada seluruh pekerjaan kami.



Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia dan dunia yang terbebas dari berbagai bentuk kemiskinan dan ketimpangan melalui dukungan penelitian untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti

Misi

- Menghasilkan bukti melalui penelitian berkualitas untuk mendukung perumusan kebijakan pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk sektor swasta, yang berperspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial terkait isu kemiskinan dan ketimpangan, perlindungan sosial, serta pembangunan manusia di tingkat nasional dan internasional
- Mendukung peningkatan kapasitas Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi, mitra pembangunan, dan sektor swasta untuk mendorong perumusan kebijakan berbasis hasil penelitian
- Mengembangkan dan mendukung diskursus kebijakan pemerintah dan nonpemerintah, termasuk sektor swasta, yang berbasis hasil penelitian
- Memperkaya khazanah pengetahuan tentang kemiskinan dan ketimpangan, perlindungan sosial, serta pembangunan manusia

SAMBUTAN PEMBINA

Pada 2022, situasi pandemi COVID-19 di Indonesia mulai membaik. Di tengah perubahan ini, SMERU tetap menjalankan aktivitas utamanya, yaitu melakukan penelitian untuk membantu penyusunan kebijakan promasyarakat miskin yang berbasis bukti. Sebagian penelitian yang dilakukan SMERU tahun ini masih berkaitan dengan pandemi COVID-19; salah satunya adalah penelitian tentang dampak pandemi terhadap usaha mikro dan kecil (UMK). Penelitian SMERU lainnya mencakup isu

akuntabilitas sosial di desa, dampak Kartu Lansia Jakarta terhadap kesejahteraan penduduk lansia di Provinsi DKI Jakarta, serta pemetaan kebutuhan pendampingan pembangunan. Selain itu, hasil penelitian Program Research on Improving Systems of Education (RISE) di Indonesia yang sudah berlangsung selama lima tahun telah disampaikan kepada para pemangku kepentingan terkait.

Pada tingkat nasional, SMERU telah mendapatkan dukungan dari—dan bekerja sama dengan—berbagai kementerian. Pada tingkat daerah, SMERU telah melakukan penelitian di empat daerah laboratorium serta mendapatkan dukungan kuat dari pemangku kepentingan pendidikan setempat. Kami menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya atas dukungan tersebut dan berharap hasil studinya membantu menghasilkan kebijakan pendidikan yang efektif dalam mengatasi krisis pembelajaran.

Pada 2022, SMERU untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam forum global Group of 20 (G20) melalui Think20 (T20). Rekomendasi yang disampaikan akan bermanfaat dalam perumusan kebijakan terkait ketimpangan, modal manusia, dan kesejahteraan masyarakat.

Kendati telah meraih berbagai capaian tersebut, SMERU masih menghadapi tantangan dalam memastikan keberlanjutan produksi pengetahuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian, terutama setelah berakhirnya program dukungan seperti Knowledge Sector Initiative (KSI). Oleh karena itu, selain terus bekerja keras untuk memastikan keberlanjutan finansial lembaga, SMERU melakukan pengembangan bisnis melalui SMERU Learning Centre.

Pada tahun ini, keluarga besar SMERU kembali berduka atas berpulangnya sahabat kami, Gregory Churchill, yang biasa dipanggil Pak Greg. Beliau adalah salah satu anggota Pembina Yayasan SMERU. Sejak SMERU didirikan, Pak Greg telah memberikan banyak masukan yang sangat berarti terhadap kemajuan lembaga. Selaku Ketua Pembina Yayasan SMERU, saya menyampaikan dukacita mendalam serta sekaligus rasa hormat dan terima kasih atas jasa-jasa beliau.

Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga donor yang terus memberikan kepercayaan dan dukungan kepada SMERU dalam menghasilkan pengetahuan guna mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti. Terima kasih juga saya sampaikan kepada tim manajemen serta pihak-pihak yang terlibat atas kerja kerasnya selama ini. ❀

Sudarno Sumarto

KETUA



SAMBUTAN MANAJEMEN

Pada 2022 SMERU terus membangun resiliensi dan kesigapannya untuk aktif berkontribusi pada penyusunan kebijakan publik yang berorientasi pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

Sepanjang 2022, kami berhasil mengerjakan 41 proyek penelitian, menghasilkan 54 publikasi (baik yang diterbitkan sendiri maupun oleh penerbit lembaga lain), menyelenggarakan 11 acara diseminasi hasil penelitian, dan 5 forum diskusi kebijakan dengan lembaga nasional dan internasional. Bekerja sama dengan Pemerintah

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kami menyelenggarakan Forum Pembangunan Daerah (FPD) dengan fokus pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan penguatan sumber daya manusia di DIY.

Pada tingkat internasional, SMERU turut mendukung presidensi Indonesia di Group of 20 (G20) melalui Think20 (T20). Kami menjadi lembaga tuan rumah Task Force 5 (T5) yang membahas isu terkait ketimpangan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan. SMERU juga bekerja sama dengan CIPPEC (Argentina) dan GIZ (Jerman) dalam menyelenggarakan kegiatan forum kebijakan yang mengangkat topik “*The Future of Work in the Global South*”.

Sementara itu, Program Research on Improving Systems of Education (RISE) di Indonesia, mengakhiri kegiatannya yang telah berjalan selama lima tahun. Temuan studi-studi RISE dirangkum dalam “5 Prioritas Kebijakan Pendidikan” untuk memajukan pembelajaran di Indonesia melalui peningkatan kemampuan dasar siswa. SMERU berupaya tetap bekerja dalam isu-isu pendidikan, di antaranya melalui keterlibatannya dalam Mitra Pendidikan Indonesia (Local Education Group).

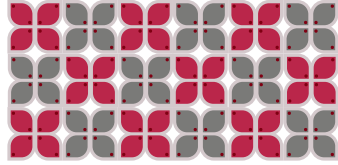
SMERU juga terus memperkuat kualitas kelembagaan internal dengan memperbarui Kebijakan Antikecurangan dan Korupsi; Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual; Kebijakan Perlindungan Anak; serta Kebijakan Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian, diharapkan semua kegiatan yang dilakukan SMERU telah mengikuti kaidah dan etika perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pada 2022, kami mengalami pergantian staf yang cukup tinggi, serta kehilangan salah satu pembina SMERU, Gregory Churchill, yang telah berpulang. Kami berduka atas kepergian Pak Greg dan merasa kehilangan guru yang senantiasa memberikan saran dan bimbingan. Ini adalah tahun yang penuh tantangan, tetapi berkat semangat dan kerja sama tim, kami mampu melewatinya dengan baik.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga donor dan para mitra yang telah memberikan dukungan dan bekerja sama dengan kami sepanjang 2022. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh staf SMERU atas kerja keras dan dedikasinya, serta kepada Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan SMERU yang terus memberikan dukungan demi lancarnya kegiatan lembaga. ❀

Widjajanti Isdijoso

DIREKTUR



YAYASAN SMERU

PEMBINA

Dr. Sudarno Sumarto

(Ketua)

The SMERU Research Institute & TNP2K, Jakarta

Prof. Dr. Syarif Hidayat

(Wakil Ketua)

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta

Dr. Syaikhu Usman

(Anggota)

The SMERU Research Institute, Jakarta

Dr. Chris Manning

(Anggota)

The Australian National University, Canberra

Dr. Ruth Stella Petrunella Thei

(Anggota)

Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Lombok

Nuning Akhmadi, M.Sc.

(Anggota)

The SMERU Research Institute (purnatugas), Tokyo

Gregory Churchill, J.D [Alm.]

(Anggota)

Konsultan hukum & dosen (purnatugas)



PENGAWAS

Dr. Asep Suryahadi

(Ketua Pengawas)

The SMERU Research Institute, Jakarta

Bambang Sulaksono, M.M.

The SMERU Research Institute (purnatugas), Jakarta

PENGURUS

Ir. Widjajanti Isdijoso, M.Ec.St.

(Ketua)

The SMERU Research Institute, Jakarta

Athia Yumna, M.Sc.

(Sekretaris)

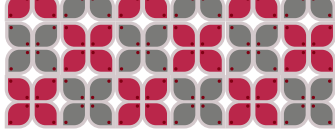
The SMERU Research Institute, Jakarta

Hesti Marsono, M.Sc.

(Bendahara)

The SMERU Research Institute, Jakarta





SMERU DALAM ANGKA

41 Penelitian



11 Topik penelitian



11 Acara diseminasi hasil penelitian



5 Acara kolaborasi dengan lembaga nasional dan internasional



2 Acara peluncuran modul pelatihan SMERU



54 Publikasi internal dan eksternal





SMERU DI INTERNET

 **592.863**

kunjungan ke situs web SMERU

Lima besar kunjungan ke situs web SMERU pada 2022 dilakukan dari Indonesia, Amerika Serikat, Afganistan, Australia, dan Britania Raya.

 **3.150**

orang menjadi *followers* baru Instagram SMERU

Pertambahan jumlah *followers* di Instagram terbanyak, dibandingkan dengan platform media sosial SMERU lainnya. Jumlah ini meningkat **55%** jika dibandingkan dengan angka pada 2021.

 **27** video *livestream* dihasilkan

Video *livestream* menyajikan diseminasi hasil penelitian yang diselenggarakan SMERU sepanjang 2022.

 **75** kali SMERU dikutip di media massa

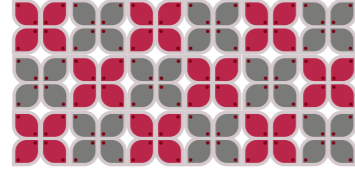
Kutipan terbanyak terjadi pada **September**, yaitu 17 kali.

 **25** video diproduksi

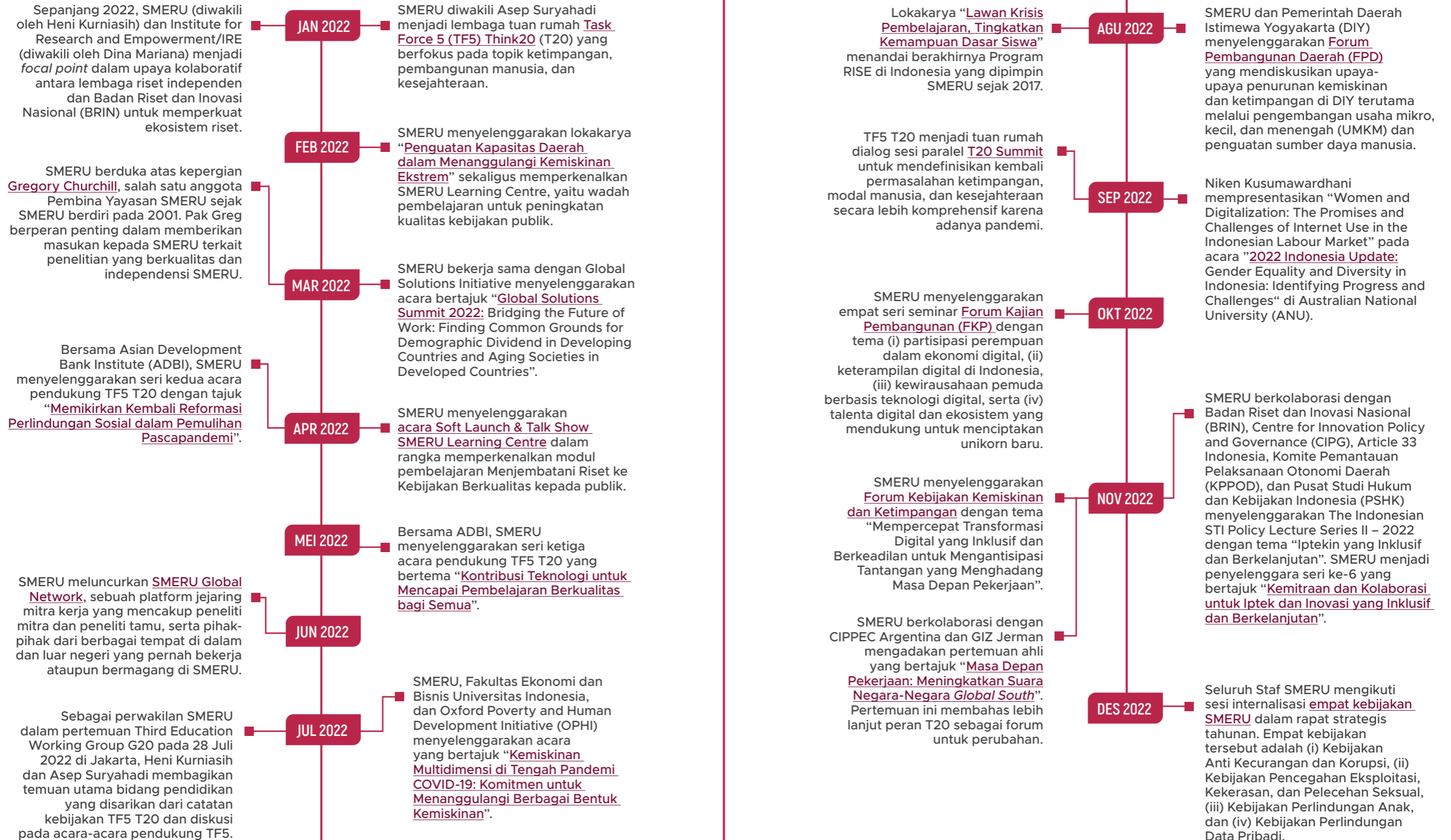
Jenis video terdiri atas video panjang, video pendek berdurasi 3–5 menit dan video *shorts* berdurasi 60 detik. Video ***Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif: Untuk Pertumbuhan Indonesia yang Lebih Berkualitas*** yang menampilkan cuplikan hasil penelitian adalah video yang paling banyak dilihat di kanal YouTube SMERU dengan jumlah *views* **538**.

 **2** seri siniar diproduksi

Seri pertama berjudul “**Reform Unreformed**” yang berkolaborasi dengan Papan Tulis Podcast, sedangkan seri kedua berjudul “**Learn and Unlearn**” yang berkolaborasi dengan Tanoto Foundation dan Papan Tulis Podcast.



MOMEN PENTING





Penelitian-penelitian Program RISE mengidentifikasi akar masalah penghambat kualitas pembelajaran di Indonesia serta mengkaji bagaimana sistem pendidikan, seperti reformasi guru di tingkat nasional dan inovasi kebijakan pendidikan di daerah, dapat mengatasi krisis pembelajaran yang telah berlangsung lama.

Lokasi: Gowa, Indonesia

Kredit Foto: Novita Eka Syaputri/SMERU

Program RISE di Indonesia Mendukung Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa

Program Research on Improving Systems of Education (RISE) adalah program penelitian multinegara berskala besar untuk mendukung peningkatan pembelajaran siswa di seluruh dunia. Program tersebut dilaksanakan di Indonesia, Etiopia, India, Pakistan, Tanzania, Vietnam, dan Nigeria. Program RISE di Indonesia sendiri dilaksanakan sepanjang 2017–2022 dan dipimpin oleh SMERU yang bekerja sama dengan Amsterdam Institute for Global Health and Development dan Mathematica. Hingga 2022, Program RISE di Indonesia menyelesaikan 15 penelitian yang berfokus pada kebijakan reformasi guru dan inovasi pendidikan di daerah serta 1 penelitian tentang pembelajaran siswa selama pandemi COVID-19. Penelitian-penelitian tersebut bertujuan mengidentifikasi akar masalah yang menghambat peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia selama ini dan sekaligus menelaah bagaimana sistem pendidikan Indonesia mengatasi krisis pembelajaran yang telah berlangsung sejak lama.

Penelitian-penelitian Program RISE di Indonesia selalu berangkat dari persoalan riil di dunia pendidikan di Indonesia serta dilakukan oleh peneliti berpengalaman dengan metode penelitian yang beragam, mulai dari *randomized controlled trials* (RCTs) hingga etnografi. Sepanjang pelaksanaannya, Program RISE di Indonesia secara aktif bekerja sama, termasuk mengomunikasikan temuan studi dan rekomendasi kebijakan, dengan Pemerintah Pusat, pemda, dan lembaga nonpemerintah.

Berkat kerja sama tersebut, Program RISE di Indonesia dapat membantu pembuat kebijakan merumuskan kebijakan pendidikan yang tepat. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, dalam acara penutupan Program RISE di Indonesia pada 2 Agustus 2022 mengatakan bahwa temuan penelitian SMERU dan Program

RISE di Indonesia sangatlah penting karena memberikan pandangan dan masukan yang objektif terhadap Kebijakan Merdeka Belajar. Menteri Nadiem juga berharap bahwa akan ada program-program penelitian selanjutnya yang menghasilkan solusi inovatif untuk mendukung kebijakan tersebut.

5 TAHUN PROGRAM RISE DI INDONESIA

16 penelitian
>85.200 responden
4 laboratorium pembelajaran^a

17 kertas kerja
262 publikasi^b

^abekerja sama dengan tiga pemerintah kabupaten/kota (Kota Bukittinggi, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kebumen) dan satu pemerintah provinsi (DKI Jakarta)

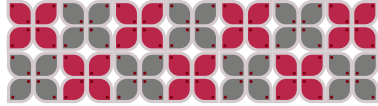
^bPublikasi berupa catatan kebijakan, *insight*, infografik, video, sinar, *e-newsletter*, dan artikel blog. Semua publikasi Program RISE di Indonesia dapat diakses di rise.smeru.or.id.

Lima Prioritas Kebijakan Pendidikan untuk Memajukan Pembelajaran di Indonesia

Meski hampir semua anak di Indonesia kini dapat bersekolah, tetap diperlukan upaya untuk memastikan bahwa pembelajaran di sekolah berkualitas baik dan anak-anak menguasai keterampilan sesuai dengan jenjang pendidikan mereka. Berikut adalah lima langkah prioritas yang dirangkum dari temuan penelitian-penelitian Program RISE di Indonesia maupun program-program serupa di negara lain.

- Berkomitmen terhadap penguasaan kemampuan dasar literasi dan numerasi
- Mengukur pembelajaran secara berkala, akurat, dan relevan
- Menyelaraskan sistem pendidikan dengan komitmen pembelajaran
- Mendukung guru dalam proses belajar-mengajar
- Mengadaptasi pendekatan dalam pengambilan kebijakan pendidikan

Baca selengkapnya di bit.ly/5ActionsRISE. 



Kebijakan pemberdayaan UMK perlu memperhatikan aspek gender agar dapat membantu perempuan pelaku UMK meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing usaha mereka.

Lokasi: Jambi, Indonesia

Kredit Foto: Rendy A. Diningrat/SMERU



Perempuan Pelaku UMK di Indonesia: Tantangan dan Potensi pada Masa Pandemi

Pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan terhadap sektor usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia, khususnya UMK yang dimiliki atau dikelola perempuan. Pandemi juga telah mendorong peningkatan pemanfaatan internet oleh pelaku usaha, termasuk perempuan pelaku UMK. Di sisi lain, banyak studi menunjukkan bahwa perempuan pelaku UMK lebih rentan terhadap dampak ekonomi akibat pandemi karena memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya keuangan dan teknologi. Pada saat yang sama, pandemi meningkatkan beban kerja mereka yang juga harus merawat anggota keluarga, termasuk anak-anak, di rumah. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada 2022, SMERU melakukan dua penelitian yang berfokus pada kelompok perempuan pelaku UMK pada masa pandemi COVID-19.

Pada penelitian pertama, SMERU mengkaji dampak pandemi COVID-19 terhadap UMK dan menemukan bahwa UMK milik perempuan menghadapi lebih banyak tantangan daripada UMK milik laki-laki. Tantangan-tantangan tersebut meliputi penurunan penjualan yang lebih besar, biaya produksi yang meningkat, modal kerja yang tidak memadai, akses pembiayaan yang sulit, dan kewajiban yang lebih besar untuk menyeimbangkan usaha dan pekerjaan rumah tangga. Meski demikian, faktor gender pemilik UMK belum dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia dalam perumusan kebijakan terkait UMK. Di samping itu, kurangnya data UMK yang terpilih berdasarkan gender menyulitkan analisis berbasis gender dalam proses perumusan kebijakan untuk mendukung UMK.

Pada penelitian kedua, SMERU melihat dampak pandemi COVID-19 terhadap penggunaan internet oleh anggota keluarga pelaku UMK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan internet oleh perempuan pelaku usaha berkorelasi positif dan kuat dengan penggunaan internet oleh anggota keluarga yang lain dalam keluarganya, terutama untuk keperluan sekolah. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa perempuan pelaku usaha yang menggunakan internet secara intensif ternyata dapat dengan lebih efektif mengajak anggota-anggota keluarganya untuk menggunakan internet dalam hal-hal yang bersifat produktif, seperti pendidikan. Dengan demikian, pemanfaatan internet oleh perempuan pelaku usaha berpotensi untuk turut mengurangi penurunan kemampuan belajar (*learning loss*) akibat kegiatan belajar di rumah selama pandemi, sebagaimana telah didokumentasikan oleh banyak penelitian lain.

Hasil dua penelitian yang dilakukan SMERU tersebut menggarisbawahi urgensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperhatikan dampak pandemi terhadap UMK yang dijalankan perempuan. Upaya-upaya peningkatan akses perempuan pelaku UMK terhadap sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan untuk mempertahankan usaha mereka harus menjadi prioritas pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan diperhatikannya aspek gender dalam kebijakan pemberdayaan UMK, perempuan pelaku UMK diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing usaha mereka. Hal tersebut akan berdampak positif tidak hanya terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan tetapi juga terhadap pemberdayaan perempuan dan anggota keluarganya. ✦



Semua pendamping perlu memiliki kompetensi dasar yang mencakup komponen kelembagaan, komunikasi, fasilitasi masyarakat, dan kemampuan manajerial.

Lokasi: Trenggalek, Indonesia

Kredit Foto: Wini Pudyastuti/SMERU

Urgensi Pemetaan Pendamping untuk Penguatan Pendampingan Pembangunan

Pendekatan pendampingan banyak digunakan dalam program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan penghidupan masyarakat. Pendampingan bertujuan mengembangkan kapasitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, pendamping berperan sekaligus sebagai pemandu proses (*process guide*) dan pemberi alat bantu (*tool giver*) bagi masyarakat dampungannya.

Akan tetapi, pemerintah menyadari bahwa pendampingan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kompetensi pendamping dan efektivitas pendampingan. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 mencantumkan penguatan pendamping pembangunan sebagai bagian dari arah kebijakan dan strategi pembangunan. Sejak 2019, SMERU terlibat dalam proses penguatan pendamping pembangunan yang dijalankan Tim Koordinasi Strategis Penguatan Pendamping Pembangunan (TKSP3) Bappenas.

Sepanjang 2019, SMERU ikut merancang standar kompetensi pendamping pembangunan dengan berbagi pengetahuan berdasarkan temuan beberapa penelitian yang berkaitan dengan pendampingan. SMERU juga melakukan penelitian yang menguji rancangan standar kompetensi tersebut sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Rekomendasi utama penelitian ini adalah bahwa semua pendamping perlu memiliki kompetensi dasar yang mencakup komponen kelembagaan, komunikasi, fasilitasi masyarakat, dan kemampuan manajerial.

Hasil penelitian tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

(SKKNI) Pendamping Pembangunan yang diproyeksikan sebagai standar kompetensi dasar pendamping. Peneliti SMERU juga terlibat dalam tim penyusun SKKNI yang, pada 13 April 2021, ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 2021.

Terakhir, pada 2022, SMERU dipercaya untuk melakukan penelitian tentang pemetaan pendamping pembangunan. Studi yang dilakukan di lima kabupaten ini bertujuan menyusun model pemetaan kebutuhan pendamping dengan menghitung beban kerja pendamping setiap program menurut tugas dan tanggung jawabnya (*supply side*).

Penelitian ini menemukan bahwa persebaran pendamping tidak merata. Pada sebagian lokasi, ditemukan kekurangan tenaga pendamping yang disebabkan oleh, antara lain, jumlah rekrutan tenaga pendamping yang tidak sesuai dengan rasio kebutuhan pendamping atau adanya pendamping yang mengundurkan diri. Namun, terjadi juga kelebihan jumlah pendamping yang umumnya dipengaruhi singkatnya waktu untuk melakukan pendampingan.

Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap program pendampingan memiliki konteks yang khas karena tergantung pada kondisi lokasi, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab, target dan mekanisme pendampingan, serta dinamika yang terjadi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penguatan pendampingan, alih-alih mengintegrasikan berbagai program menjadi satu tugas pendampingan, lebih baik diarahkan untuk memastikan bahwa para pendamping berkoordinasi dan bersinergi sebagai kesatuan sistem pendampingan. ✖



Penyaluran bantuan KLJ perlu dilakukan secara rutin setiap bulan untuk membantu mengurangi beban penduduk lansia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Lokasi: Jakarta, Indonesia

Kredit Foto: M. Harits Kamaaluddin/SMERU

Program Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Penduduk Lansia

Perlindungan sosial bagi penduduk lansia, terutama di Indonesia, merupakan isu penting. Menurut Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, sekitar 43% penduduk lansia Indonesia termasuk dalam kelompok 40% masyarakat dengan pengeluaran terendah. Pemerintah Pusat telah melaksanakan program-program perlindungan khusus bagi penduduk lansia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) komponen lansia dan Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT), guna mengurangi kerentanan yang mereka alami. Namun, cakupan program-program tersebut masih sangat terbatas.

Oleh sebab itu, SMERU melakukan beberapa penelitian tentang kesejahteraan penduduk lansia. Salah satu penelitiannya yang terbaru adalah penelitian tentang dampak Kartu Lansia Jakarta (KLJ)¹ terhadap kesejahteraan penduduk lansia di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan kolaborasi antara SMERU dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dilakukan pada akhir 2022.

Penelitian ini menemukan bahwa KLJ dapat mengurangi kemungkinan ketergantungan individu lansia pada bantuan finansial dari orang lain. Pengurangan ketergantungan ini tecermin dari peralihan sumber pengeluaran penduduk lansia, yaitu dari anggota keluarga menjadi bantuan KLJ. Temuan ini konsisten jika dilihat menurut jenis kelamin individu lansia. Artinya, ketergantungan penduduk lansia, baik laki-laki maupun perempuan, pada bantuan finansial dari pihak lain berkurang dengan adanya KLJ. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa KLJ meningkatkan kemungkinan penduduk lansia untuk mengikuti kegiatan posyandu

lansia dan kegiatan keagamaan. Peningkatan partisipasi ini tentu merupakan hal positif, mengingat salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan posyandu lansia adalah kesehatan. Dengan demikian, kesehatan penduduk lansia penerima KLJ dapat lebih terjaga.

Berdasarkan penelitian ini, SMERU mengusulkan beberapa rekomendasi tentang penyempurnaan program KLJ. Dua di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, penyaluran bantuan KLJ perlu dilakukan secara rutin setiap bulan untuk membantu mengurangi beban penduduk lansia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kedua, program seperti KLJ dapat dikembangkan agar mencakup bantuan nontunai berupa layanan, seperti penjemputan individu lansia menuju fasilitas kesehatan.

Sebagian dari hasil penelitian ini telah disampaikan kepada beberapa pemangku kepentingan, seperti Dinas Sosial DKI Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Hasil lengkap penelitian ini direncanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara KLJ pada awal 2023. Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengarusutamaan bansos yang konsisten dan rutin bagi penduduk lansia, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun pemda. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pemda lain dalam mengembangkan bansos khusus bagi penduduk lansia. ❀

¹ KLJ adalah program perlindungan sosial khusus bagi penduduk lansia di Provinsi DKI Jakarta yang menyediakan uang tunai sebesar Rp600.000 per bulan bagi setiap individu lansia.



Penguatan akuntabilitas sosial pada program semacam Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan meningkatkan kualitas penargetan dan keefektifan upaya penanggulangan kemiskinan di desa.

Lokasi: Bima, Indonesia

Kredit Foto: Rahmayati/SMERU

Peran Aktif Masyarakat Menentukan Akuntabilitas Sosial di Desa

Akuntabilitas sosial merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan tata kelola desa. Salah satu bentuk akuntabilitas sosial adalah partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pemerintah desa (pemdes) agar bertanggung jawab dan tanggap terhadap kebutuhan warganya. Namun, pertanggungjawaban pembangunan desa saat ini cenderung lebih kuat ke atas (pemerintah supradesa) daripada ke bawah (masyarakat). Hal ini tidak sejalan dengan asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menitikberatkan akuntabilitas kepada masyarakat. Selain itu, akuntabilitas sosial berperan penting dalam pelaksanaan program pemerintah yang menysasar masyarakat, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penguatan akuntabilitas sosial pada program semacam ini akan meningkatkan kualitas penargetan dan keefektifan upaya penanggulangan kemiskinan di desa.

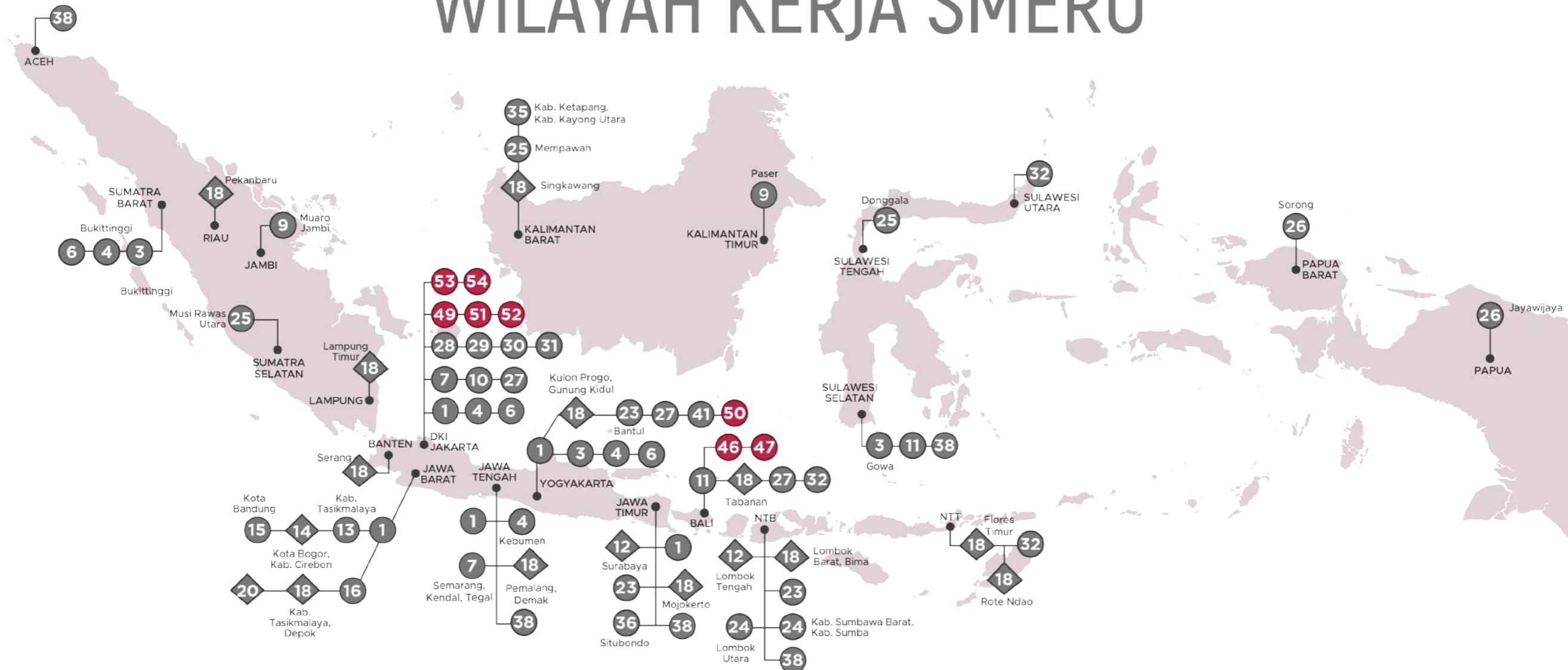
Pada 2021 dan 2022, SMERU melakukan dua penelitian tentang akuntabilitas sosial di desa. Pada penelitian pertama, SMERU mengevaluasi upaya KOMPAK memperkuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemdes, serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa upaya tersebut berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta yang terlibat, yaitu perwakilan pemdes, BPD, dan masyarakat, tentang tata kelola desa. Namun, akuntabilitas sosial yang cukup kuat belum terwujud bahkan pada kelompok desa yang mendapatkan intervensi. Baik di desa intervensi maupun nonintervensi, pemdes belum menempatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Ruang partisipasi masyarakat, terutama kelompok marginal, untuk menyuarakan aspirasinya belum efektif. Periode intervensi yang relatif singkat dan ketiadaan strategi untuk memastikan keberlanjutannya merupakan faktor yang mungkin menyebabkan persoalan tersebut.

Pada penelitian kedua, dengan dukungan Save the Children Indonesia, SMERU mempelajari praktik akuntabilitas sosial dalam penargetan penerima bansos di desa, khususnya BLT-Dana Desa (DD) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses penargetan kedua bansos belum sepenuhnya partisipatoris, transparan, dan akuntabel. Hal ini terlihat dari, antara lain, pengusulan calon penerima yang kurang melibatkan masyarakat umum, informasi mengenai daftar penerima yang kurang terbuka, dan saluran pengaduan yang belum dikelola dengan baik sehingga jarang diakses warga. Oleh karena itu, SMERU menyusun Panduan Penargetan Penerima Bansos di Desa dan telah menyelenggarakan pelatihan tentang panduan tersebut bagi pemangku kepentingan terkait di desa/kabupaten studi. Mereka menyambut panduan ini dengan positif dan berkomitmen untuk menerapkannya pada penargetan BLT-DD 2023 agar proses dan hasilnya lebih akuntabel secara sosial.

Dari dua penelitian tersebut, SMERU memberikan rekomendasi tentang upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk memperkuat akuntabilitas sosial di desa. Pemdes perlu memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dengan, antara lain, menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa secara terbuka, menyediakan sarana penyampaian aspirasi yang mudah diakses warga, serta merespons aspirasi mereka dengan cepat. Namun, upaya memperkuat akuntabilitas sosial tidaklah mudah untuk dilakukan. Temuan dua penelitian SMERU tersebut menegaskan bahwa pendampingan pemdes, BPD, dan masyarakat harus berkelanjutan agar penguatan akuntabilitas sosial terus berjalan dengan baik. ❀



WILAYAH KERJA SMERU



● Wilayah cakupan penelitian

● Wilayah cakupan kegiatan nonpenelitian

■ Penelitian dengan cakupan nasional

2 8 10 17 19 21 22

23 33 34 37 39 40

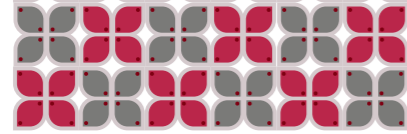
■ Cakupan Nasional Nonpenelitian

42 43 44 45 48

◆ Cakupan Nasional dengan Studi Kasus di Kota, Kabupaten, dan Provinsi

5 12 14 18

Legenda Peta halaman 24



Legenda Wilayah Kerja SMERU

KEGIATAN PENELITIAN

Pendidikan

- 1 Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan
- 2 Organisasi Profesi Guru
- 3 Faktor Pendukung atau Penghambat Inovasi Kebijakan Pendidikan Kabupaten/Kota
- 4 Dampak Kebijakan Pendidikan Kabupaten/Kota
- 5 Penyebaran Inovasi Kebijakan Pendidikan Kabupaten/Kota
- 6 Pandemi COVID-19 dan Hilangnya Pembelajaran
- 7 Konsultasi Penelitian untuk Penerapan Intervensi *High-Touch High-Tech* di SMP di Indonesia
- 8 Mendukung Perancangan Evaluasi Dampak dan Melakukan Survei Baseline Sekolah untuk Pilot Intervensi *High-Touch High-Tech* di SMP di Indonesia
- 9 Pengukuran Dampak Program Tanoto Foundation Indonesia
- 10 Merancang Pilot Intervensi Pendidikan *High-Touch High-Tech* di SMP di Indonesia

Anak, Remaja & Pemuda

- 11 Evaluasi Inisiatif Keterlibatan Pemuda
- 12 Kajian Kondisi Kesejahteraan Anak secara Moneter dan Multidimensi
- 13 Kajian Kondisi Kehidupan Anak Berbasis Lingkungan Tempat Tinggal
- 14 Dialog Kebijakan Kesejahteraan Subjektif Anak di Provinsi Jawa Barat
- 15 Penelitian Kualitatif tentang Pengalaman dan Pandangan Anak-anak terhadap Pandemi COVID-19
- 16 Pengembangan Indeks Kesejahteraan Holistik Anak
- 17 Kemajuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait Anak: Mempertimbangkan Dampak Pandemi COVID-19
- 18 Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi COVID-19 terhadap Rumah Tangga dan Kelompok Rentan di Indonesia
- 19 Analisis Lanskap Anak Penyandang Disabilitas di Indonesia
- 20 Kajian Pendahuluan Pembangunan Pemuda untuk RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045
- 21 Penulisan Laporan Indeks Pembangunan Pemuda 2022
- 22 Penyusunan Policy Brief Penanggulangan Pekerja Anak di Sektor Pertanian

Pengembangan Penghidupan & Pembangunan Masyarakat

- 23 Mendorong Terwujudnya Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan untuk Mencapai Keberlanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur, Indonesia
- 24 Kajian *Baseline* Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat di Sekitar Operasi Tambang AMNT
- 25 Studi Pemetaan Kebutuhan Pendamping Pembangunan pada Tim Koordinasi Sistem Penguatan Pendampingan Pembangunan

Perlindungan Sosial

- 26 Penguatan Infrastruktur Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Berisiko di Indonesia Pasca-COVID-19: Tinjauan Sistematis terhadap Papua
- 27 Studi Program Bantuan Lansia
- 28 Pengembangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahap I
- 29 Pengembangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahap II
- 30 Pengembangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahap III

Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim

- 31 Analisis Dampak Kualitas Udara terhadap Kehidupan Masyarakat Jakarta
- 32 Studi Penurunan Ketimpangan di Kawasan Konservasi Perairan

Ekonomi Digital & Kreatif

- 33 Studi Akselerasi Keterampilan Digital di Indonesia

Kebijakan Ekonomi

- 34 Evaluasi Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Bidang Ketenagakerjaan
- 35 Studi Lanjutan di Kalimantan Barat untuk Agenda Pembangunan Ekonomi Inklusif di Daerah Kaya Sumber Daya

Kemiskinan & Ketimpangan

- 36 Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur

Ketenagakerjaan & Migrasi

- 37 Kajian Dampak COVID-19 terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja Sektoral, Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Tata Kelola Pemerintahan & Desentralisasi

- 38 Studi Manfaat Program KOMPAK dalam Penguatan Akuntabilitas Sosial di Tengah Pandemi COVID-19

- 39 Tim Koordinasi Strategis Penguatan Pendampingan Pembangunan

Gender & Perempuan

- 40 Dampak Gender dari Respons Kebijakan Usaha Kecil dan Menengah terhadap Pandemi COVID-19 di Asia Tenggara: Contoh dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam
- 41 Dampak Partisipasi Perempuan dalam Perdagangan Online: Bukti dari Indonesia

KEGIATAN NONPENELITIAN

Pendidikan

- 42 Kampanye Diseminasi Hasil Penelitian Program RISE di Indonesia
- 43 Kolaborasi Kampanye Pendidikan Program RISE Indonesia dan Tanoto Foundation

Ekonomi Digital & Kreatif

- 44 Forum Kebijakan Kemiskinan dan Ketimpangan 2022 SMERU “Mempercepat Transformasi Digital yang Inklusif dan Berkeadilan untuk Mengantisipasi Tantangan yang Menghadang Masa Depan Pekerjaan”

Kebijakan Ekonomi

- 45 Forum Kajian Pembangunan (FKP) SMERU 2022

Kemiskinan & Ketimpangan

- 46 Kegiatan Pendukung TF5 T20: Global Summit Solutions 2022 “Menjembatani Pekerjaan pada Masa Depan: Menemukan Landasan Bersama untuk Bonus Demografi di Negara Berkembang dan Masyarakat yang Menua di Negara Maju”
- 47 Sesi Paralel dalam T20 Summit: “Memikirkan Kembali Reformasi Perlindungan Sosial dalam Pemulihan Pascapandemi”
- 48 Kegiatan Pendukung TF5 T20: Webinar “Kontribusi Teknologi untuk Mencapai Pembelajaran Berkualitas bagi Semua”
- 49 Pelatihan “Understanding Poverty in the Mekong Region”
- 50 Forum Pembangunan Daerah 2022 “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas untuk Pemulihan Ekonomi, Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Pascapandemi di Daerah Istimewa Yogyakarta”

Lainnya

- 51 Pelatihan Penulisan dan Penyajian *Policy Brief*
- 52 Pelatihan Meneliti di Masa Pandemi
- 53 Pelatihan Metodologi Riset dan Riset Kebijakan
- 54 Pelatihan Advokasi Kebijakan Tanoto Foundation



SMERU Memimpin Task Force 5 Think20

SMERU turut berpartisipasi dalam forum Presidensi G20 Indonesia 2022 melalui Think20 (T20). Forum yang mempertemukan berbagai lembaga pengkajian kebijakan (*think tanks*) tingkat dunia ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian kepada negara-negara anggota G20. Sementara itu, T20 terdiri atas sembilan gugus tugas (*task forces*) yang berperan sebagai bank gagasan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dibahas oleh negara-negara G20. Secara khusus, SMERU ditunjuk sebagai lembaga tuan rumah Task Force 5 (TF5) yang berfokus pada isu-isu tentang ketimpangan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan dari November 2021 hingga September 2022.

SMERU memimpin TF5 dengan Asep Suryahadi sebagai *lead co-chair* bersama *co-chairs* Alejandra Cardini (Director of the Education Program, CIPPEC), Tetsushi Sonobe (Dean and CEO, ADBI), Elan Satriawan (Kepala Kelompok Kerja Kebijakan, TNP2K), Shantayanan Devarajan (Professor of the Practice of International Development, Georgetown University), dan Vivi Alatas (CEO, Asakreativita). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan TF5 adalah

- a) menghasilkan 17 catatan kebijakan yang disusun oleh penulis dari berbagai belahan dunia;
- b) merumuskan catatan kebijakan terpadu tentang ketimpangan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan;
- c) memastikan keselarasan catatan kebijakan tersebut dengan agenda G20 dan T20; serta
- d) menyelenggarakan lima acara pendukung yang bertujuan mengedepankan diskusi dengan para ahli dan akademisi dalam rangka menemukan solusi atas persoalan ketimpangan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan yang dihadapi negara-negara anggota G20 akibat pandemi COVID-19.

Sebagai lembaga tuan rumah TF5, SMERU bekerja sama dengan para peneliti dan *think tanks* dari seluruh dunia yang tergabung dalam T20, serta pejabat dalam kelompok-kelompok kerja G20. Kemitraan ini mendorong keterlibatan SMERU dalam proses perumusan kebijakan pada tingkat global. ✖



Kolaborasi Antarlembaga demi Terwujudnya Kebijakan Berbasis Bukti

Dalam mencapai visi terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas dari kemiskinan absolut dan ketidakmerataan yang tinggi melalui penelitian yang bertujuan menghasilkan strategi, kebijakan, dan aksi penanggulangan kemiskinan dan ketidakmerataan yang berbasis bukti, SMERU secara aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik sesama organisasi nonprofit, universitas, pemerintah, maupun sektor swasta. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan penelitian dan diseminasi hasil penelitian guna mendukung diskursus kebijakan pemerintah dan sektor swasta yang berbasis hasil penelitian.

Kegiatan-kegiatan kolaborasi SMERU sepanjang 2022 yang dilaksanakan dalam bentuk acara untuk mendiseminasikan hasil penelitian adalah sebagai berikut.

a) Forum Pembangunan Daerah (FPD), Agustus 2022

SMERU bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Universitas Muhammadiyah (UMY) Yogyakarta untuk menggelar forum dialog kebijakan dengan topik pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penguatan sumber daya manusia.

b) Forum Kajian Pembangunan (FKP), Oktober 2022

Pada seri seminar FKP ini, SMERU bekerja sama dengan perusahaan teknologi Tokopedia dan mengusung topik percepatan pemulihan pascapandemi melalui transformasi digital yang inklusif.

c) The Indonesian STI Policy Lecture Series II, November 2022

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara SMERU, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Article 33 Indonesia, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). SMERU menjadi penyelenggara seri diskusi ke-6 yang membahas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (iptekin) yang inklusif dan berkelanjutan.

d) Kampanye Pendidikan, Desember 2022

Program Research on Improving Systems of Education (RISE) di Indonesia, Tanoto Foundation, dan Papan Tulis Podcast membuat seri sinar “Learn and Unlearn” yang mengulas lima prioritas kebijakan pendidikan.

Selain menyelenggarakan acara-acara tersebut, SMERU menjadi bagian dari komunitas praktisi (*community of practice*) untuk merawat ekosistem penelitian yang sehat melalui kolaborasi antarlembaga riset independen (LRI). Misalnya, pada periode 2022–2023, SMERU (diwakili oleh Heni Kurniasih) menjadi Koordinator FKP Sekretariat-Indonesia Project dengan Universitas Sam Ratulangi (diwakili oleh Joy Tulung) sebagai wakil koordinator. Selain itu, pada 2022, SMERU berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan universitas untuk memperkuat perannya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pemagangan. ❀



Forum Kebijakan Kemiskinan dan Ketimpangan 2022 SMERU: Mendorong Transformasi Digital yang Inklusif dan Berkeadilan

Transformasi digital memberikan sarana dan peluang baru bagi Indonesia untuk mempercepat pemulihan pascapandemi COVID-19. SMERU berupaya mengangkat diskusi terbatas tentang pentingnya mendorong transformasi digital yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia melalui acara Forum Kebijakan Kemiskinan dan Ketimpangan yang diselenggarakan pada 29–30 November 2022 di Aston Sentul Lake Resort and Conference Centre, Bogor.

Dalam forum ini, SMERU mempresentasikan makalah posisi tentang cara untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berkeadilan guna mengantisipasi tantangan yang menghadang masa depan pekerjaan. Salah satu pembahasan dalam sesi diskusi adalah bagaimana mengoptimalkan transformasi digital untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Sebagai lembaga yang memiliki visi “terwujudnya masyarakat Indonesia dan dunia yang terbebas dari berbagai bentuk kemiskinan dan ketimpangan”, SMERU beranggapan bahwa transformasi digital harus memiliki andil dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.

Sementara itu, isu perubahan teknologi dan masa depan pekerjaan turut menjadi perhatian negara-negara Selatan Global (Global South). Oleh karena itu, pada hari kedua, SMERU berkolaborasi dengan CIPPEC Argentina dan GIZ Jerman dalam menyelenggarakan pertemuan ahli yang membahas lebih lanjut isu-isu pasar tenaga kerja, ketimpangan, dan perubahan teknologi yang berkaitan dengan peran T20 sebagai forum untuk memanfaatkan perubahan. Salah satu pembahasannya berfokus pada pendekatan Indonesia terhadap topik-topik yang termasuk dalam payung tematik pasar tenaga kerja dan masa depan pekerjaan serta pelajaran penting yang dapat dipetik dari proses tersebut.

Forum Kebijakan Kemiskinan dan Ketimpangan 2022 merupakan acara perdana yang direncanakan untuk diselenggarakan setiap tahun dengan tema yang berbeda. Forum ini bertujuan mengidentifikasi tren terkini dan respons kebijakan dan strategi terhadap tantangan transformasi digital serta menghasilkan gagasan dan rekomendasi ke depan. ❁




SMERU Learning Centre: Wadah untuk Belajar Penelitian Kebijakan

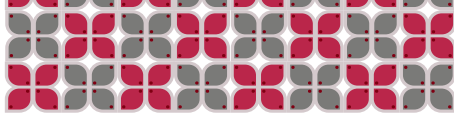
Sebagai lembaga penelitian terdepan, The SMERU Research Institute berpengalaman dalam melakukan penelitian sosial-ekonomi dan menjalin hubungan baik dengan pembuat kebijakan di tingkat nasional maupun daerah selama lebih dari 20 tahun. Dengan pengalaman tersebut, pada 2022 SMERU membentuk SMERU Learning Centre, sebuah wadah untuk belajar penelitian sosial-ekonomi yang berfokus pada isu-isu ketimpangan dan kemiskinan.

SMERU Learning Centre menawarkan berbagai layanan yang didesain berdasarkan kesadaran bahwa kemiskinan merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama dalam perumusan kebijakan. SMERU Learning Centre menyediakan layanan pelatihan bagi masyarakat umum ataupun kalangan tertentu, baik secara daring maupun luring, untuk meningkatkan kapasitas diri maupun lembaga mereka dalam melakukan penelitian kebijakan dan memanfaatkan hasilnya. SMERU Learning Centre juga menyediakan platform pembelajaran elektronik (*e-learning*) bagi masyarakat yang ingin mempelajari isu-isu ketimpangan dan kemiskinan dalam penelitian sosial-ekonomi untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti. SMERU Learning Centre menyediakan materi pembelajaran yang dapat membantu peserta dari berbagai kalangan, seperti analis dan peneliti kebijakan, aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat maupun daerah,

akademisi, pekerja organisasi nonpemerintah (ornop), serta pekerja di sektor swasta, yang pekerjaannya berhubungan dengan analisis kebijakan publik yang berperspektif kemiskinan dan ketimpangan.

Hingga kini, SMERU Learning Centre telah memperkenalkan dua modul pembelajaran yang dapat diakses publik. Modul pertama, Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, berisi beragam konsep dan dimensi kemiskinan, metode pengukuran kemiskinan, hingga perkembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Sementara itu, modul kedua, Strategi Menjembatani Riset ke Kebijakan Berkualitas, menawarkan pembelajaran tentang penyusunan kebijakan publik berdasarkan riset yang berkualitas serta berbagai strategi untuk mewujudkan hal tersebut. Modul-modul pembelajaran lainnya akan dikembangkan dengan jenis pelatihan dan materi peningkatan kapasitas yang lebih beragam sesuai dengan tren dan kebutuhan pengguna saat ini.

Melalui SMERU Learning Centre, SMERU ingin berkontribusi terhadap peningkatan literasi riset secara berkelanjutan. Temukan informasi lebih lanjut mengenai SMERU Learning Centre serta jadwal pelatihan dan kegiatan lainnya pada <https://slclab.id/>. 



PUBLIKASI SMERU

54

publikasi internal dan eksternal terbit pada 2022

1	Makalah strategi
2	Bab dalam buku
2	Laporan tahunan
3	Terbitan ringkas (<i>briefs</i>)
3	Catatan penelitian
3	<i>Insights</i>
3	Artikel blog
3	Infografik
5	Laporan penelitian
6	Artikel jurnal
9	Kertas kerja
14	Artikel di media

Delapan publikasi terpilih

Laporan Penelitian	<p>"KAJIAN DAMPAK BANTUAN IURAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PADA MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU"</p> <p>Penulis: Nurmala Selly Saputri dan Sri Murniati</p>
--------------------	---

Laporan ini memaparkan hasil evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini berdampak positif, baik dari segi utilisasi pelayanan kesehatan maupun peningkatan proteksi finansial bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Namun, meskipun penduduk miskin peserta JKN penerima bantuan iuran terus meningkat, masih ada ketimpangan distribusinya antarwilayah dan antarkelompok usia.

Kertas Kerja	<p>"WHO BENEFITS AND LOSES FROM LARGE CHANGES TO STUDENT COMPOSITION? ASSESSING IMPACTS OF LOWERING SCHOOL ADMISSIONS STANDARDS IN INDONESIA"</p> <p>Penulis: Emilie Berkhout, Goldy Fariz Dharmawan, Amanda Beatty, Daniel Suryadarma, dan Menno Pradhan</p>
--------------	--

Kertas kerja ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi di sekolah menengah pertama di Yogyakarta menyebabkan perubahan komposisi siswa yang kemudian memengaruhi pembelajaran siswa. Perubahan komposisi siswa ini juga mendorong guru untuk mengubah pendekatan mereka dalam mengelola kelas.

Kertas Kerja	<p>"A POLICY LENS ON BECOMING A TEACHER: A LONGITUDINAL DIARY STUDY OF NOVICE TEACHER PROFESSIONAL IDENTITY FORMATION IN INDONESIA"</p> <p>Penulis: Ulfah Alifia, Rezanti Putri Pramana, dan Shintia Revina</p>
--------------	--

Kertas kerja ini menguraikan bagaimana identitas guru muda di Indonesia terbentuk dan berbagai aspek yang membentuk proses ini, termasuk kebijakan terkait guru. Argumen yang disampaikan didasarkan pada penelitian yang unik, yang menggunakan metode catatan harian dalam merekam pengalaman guru muda pada tahun-tahun awal mereka menjadi guru. Temuan yang dipaparkan dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki kebijakan-kebijakan yang terkait guru.

**Catatan
Penelitian**

"MENDUKUNG TRANSFORMASI DIGITAL USAHA MIKRO DAN KECIL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19"

Penulis: Palmira Permata Bachtiar, Niken Kusumawardhani, dan Veto Tyas Indrio

Catatan penelitian ini mengungkapkan anggapan pelaku usaha yang sudah masuk ke lokapasar bahwa biaya platform terlalu mahal. Di sisi lain, pemilik usaha mikro dan kecil (UMK) mengakui bahwa penggunaan internet yang lebih intensif merupakan salah satu cara mereka untuk bertahan selama pandemi.

**Artikel
blog**

"SITUASI KEMISKINAN SELAMA PANDEMI"

Penulis: Ridho Al Izzati

Artikel blog ini adalah publikasi SMERU yang paling banyak diakses pada 2022, yaitu sebanyak 28.237 kali. Artikel yang ditulis pada 2021 ini mengulas tingkat kesejahteraan sebagian besar rumah tangga Indonesia yang menurun pada masa pandemi COVID-19 serta strategi yang diterapkan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka selama pandemi.

**Artikel
jurnal
akademis**

"DISABILITY AND LABOR MARKET EXCLUSION: EVIDENCE FROM INDONESIA"

Penulis: Rika Kumala Dewi, Ridho Al Izzati, dan Asep Suryahadi

Artikel dalam jurnal *Sustainability Science and Resources* ini menyampaikan bahwa penyandang disabilitas menghadapi hambatan yang kuat dan persisten untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Diperlukan kombinasi dorongan pada tingkat individu, dukungan lingkungan sekitar, serta kebijakan pemerintah untuk mendorong inklusi penyandang disabilitas ke dalam pasar tenaga kerja. Dalam artikel ini, disampaikan pula beberapa rekomendasi kebijakan afirmatif untuk meningkatkan keinklusan tersebut.

**Artikel
jurnal
akademis**

"GENDER POLICIES OF THE NEW DEVELOPMENTAL STATE: THE CASE OF INDONESIAN NEW PARTICIPATORY VILLAGE GOVERNANCE"

Penulis: Muhammad Syukri

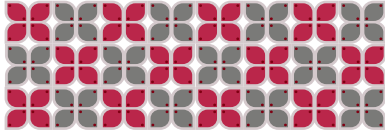
Artikel dalam *Journal of Current Southeast Asian Affairs* ini mendiskusikan bagaimana kebijakan pembangunan Pemerintah Indonesia yang baru menyikapi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam upaya pelebagaan pendekatan partisipatoris dalam birokrasi pemerintahan. Berdasarkan analisis data kualitatif dan studi pemantauan longitudinal, artikel ini berargumentasi bahwa kebijakan tata kelola desa secara partisipatif yang baru lebih berfokus pada perekonomian dan infrastruktur desa dengan mengabaikan isu-isu yang lebih sensitif, seperti transformasi struktur gender tradisional.

**Artikel
jurnal
akademis**

"INTERNET USAGE AMONG WOMEN-LED MICRO AND SMALL ENTERPRISES AND HOUSEHOLD MEMBERS' USE OF THE INTERNET AT HOME: EVIDENCE FROM INDONESIA DURING THE COVID-19 PANDEMIC"

Penulis: Niken Kusumawardhani, Anna Falentina, Palmira Permata Bachtiar, dan Veto Tyas Indrio

Artikel dalam jurnal *Asia & the Pacific Policy Studies* ini mengangkat isu yang perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan, yaitu upaya untuk meningkatkan kemelekakan digital perempuan pelaku UMK agar mereka dapat memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Pemanfaatan teknologi digital secara maksimal sangat penting untuk pengembangan usaha dan mengurangi kesenjangan gender pada sektor kerja.



KETERLIBATAN DALAM PROSES KEBIJAKAN

Memengaruhi Kebijakan/Peraturan



Sejak lima tahun lalu, SMERU memberikan dukungan teknis kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun indeks pembangunan ekonomi inklusif (IPEI) pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta menghitung proyeksi IPEI hingga 2029. Indeks ini akan mulai digunakan sebagai salah satu indikator capaian pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.



Hasil studi SMERU tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Sidoarjo digunakan oleh Dinas Kesehatan sebagai acuan perbaikan pelayanan di puskesmas dan Dinas Kesehatan. Bappeda Kabupaten Sidoarjo juga menggunakan hasil studi tersebut sebagai masukan untuk penyusunan kebijakan penganggaran bidang kesehatan.



Kota Bukittinggi mengadopsi instrumen tes untuk seleksi guru honorer yang disusun berdasarkan hasil penelitian RISE-SMERU mengenai mekanisme perekrutan guru honorer di Kota Bukittinggi. Hasil penelitian ini juga dijadikan acuan untuk perbaikan mekanisme perekrutan guru honorer.

Menyediakan Masukan untuk Penyusunan Kebijakan



Berdasarkan hasil studi SMERU dan TNP2K mengenai situasi kelompok lansia dan akses terhadap perlindungan sosial, SMERU menyampaikan rekomendasi kepada kementerian terkait dan pemerintah daerah mengenai perlunya peningkatan efektivitas program bantuan sosial kelompok lansia dari Pemerintah

Pusat dan pemerintah daerah yang ada saat ini dan penyusunan kebijakan untuk menyediakan pendapatan minimum bagi warga lansia yang belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.



Dalam forum penyusunan kajian pendahuluan RPJPN 2025–2045 bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak, SMERU menyampaikan usulan kepada Kementerian PPN/Bappenas agar meningkatkan jangkauan dan kualitas program pembinaan pengasuhan—salah satunya dengan menyediakan pendidik yang memiliki kapasitas profesional di bidang pengasuhan anak.



Dalam diskusi kelompok terfokus tentang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Perekonomian, SMERU menyampaikan rekomendasi bahwa, agar internet meningkatkan kesejahteraan secara merata untuk semua, diperlukan perluasan jaringan internet, pengaturan persaingan usaha berbasis jaringan, pemerataan akses untuk memanfaatkan internet, dan jaminan sosial untuk pekerja berbasis internet.



SMERU memberikan masukan terhadap draf komponen standar pembiayaan dan juknis perhitungan satuan biaya pendidikan untuk perbaikan draf Standar Pembiayaan Pendidikan, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dalam rangka penyusunan Standar Pembiayaan Pendidikan oleh Kemendikbudristek.



Berdasarkan hasil studi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Desa, dalam forum penyusunan kajian pendahuluan RPJPN 2025–2045 tentang desain kebijakan keuangan daerah yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, SMERU menyampaikan rekomendasi agar pemerintah



mengurangi kebijakan yang bersifat instruksional terkait Dana Desa dan lebih mengedepankan pendekatan kolaboratif yang berbasis isu untuk diatasi bersama.



SMERU menyampaikan paparan di hadapan Kementerian PPN/Bappenas tentang dinamika pergeseran sektor-sektor ekonomi dan tenaga kerja di perdesaan untuk penyusunan RPJPN 2025–2045. SMERU juga menyampaikan masukan berupa strategi untuk menghadapi transformasi tenaga kerja sektor pertanian, faktor-faktor pendukung transformasi tenaga kerja di perdesaan, strategi untuk mengurangi dominasi sektor pertanian di perdesaan, dan keseimbangan relasi perdesaan-perkotaan akibat adanya transformasi tenaga kerja.



Dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta para deputinya dengan beberapa tokoh untuk membahas investasi di Indonesia, SMERU memberikan masukan untuk mengganti istilah “subsidi” mobil listrik dengan “insentif pajak”.

Menyampaikan Informasi Berbasis Bukti kepada Pembuat Kebijakan



SMERU mempresentasikan hasil studi pemetaan pemangku kepentingan yang berperan dalam ekosistem kewirausahaan pemuda pada acara Youth for SDGs Summit yang diselenggarakan UNDP dan UNICEF Indonesia bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, dan DPR RI.



SMERU mempresentasikan hasil studi dampak pandemi COVID-19 terhadap layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak kepada Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia (Kementerian Kesehatan) dan mitra Knowledge Sector Initiative (KSI) pada acara Knowledge to Policy Conference yang diselenggarakan KSI.

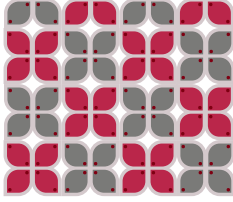


SMERU mempresentasikan temuan studi ekonomi digital kepada anggota DPR RI dan Direktur Ekonomi Digital dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada diskusi kelompok terfokus mengenai ekonomi digital yang diselenggarakan DPR RI.

Membangun Konsensus di Antara Para Pemangku Kepentingan



SMERU memperkenalkan Program MENGEJAR (Matematika Menyenangkan Sesuai Jenjang dan Interaktif) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan di Kabupaten Kendal dan Kota Tegal. MENGEJAR adalah program peningkatan kompetensi guru SMP melalui pelatihan penggunaan *e-learning* dalam pembelajaran matematika dan penerapan pendekatan pembelajaran yang interaktif serta berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher-order thinking skills*). Pihak-pihak yang hadir menyatakan komitmen mereka untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihannya.



DATA & INFORMASI

Peta Status Gizi Indonesia

<https://smeru.or.id/en/nutritionmap>

Peta Status Gizi di Indonesia menyajikan estimasi status gizi anak bawah lima tahun (balita) di tingkat desa dan kecamatan di enam kabupaten yang termasuk dalam wilayah prioritas penanganan *stunting*. Dibuat dengan menggunakan metode estimasi wilayah kecil (*small area estimation/SAE*), peta ini bertujuan membantu menentukan desa prioritas dalam penanganan *stunting*.

Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia

<https://povertymap.smeru.or.id/>

Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2015 memuat estimasi angka kemiskinan dan berbagai indikator penghidupan masyarakat di **6.599** kecamatan dan **75.267** desa/kelurahan berdasarkan batas-batas administratif pada 2010. Peta ini dapat digunakan sebagai dasar penetapan desa/kelurahan prioritas dalam penanggulangan kemiskinan serta riset-riset terkait kemiskinan dari berbagai dimensi.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

<https://inklusif.bappenas.go.id/indeks>

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) menyajikan tingkat keinklusifan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Indeks yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama SMERU ini dapat digunakan untuk mengukur dan memantau tingkat keinklusifan pembangunan di Indonesia di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.



Pangkalan Data Ornop

<https://smeru.or.id/en/content/ngo-database>

Pangkalan Data Organisasi Nonpemerintah (Ornop) berisi data ornop tingkat nasional dan daerah yang paling lengkap di Indonesia. Selain digunakan oleh SMERU untuk menyebarluaskan publikasi dan informasi tentang kegiatan dan hasil penelitian SMERU, pangkalan data ini digunakan oleh SMERU dan lembaga-lembaga lain untuk mengidentifikasi keberadaan ornop di berbagai bidang dan lokasi. Hingga akhir 2022, terdapat **1.649** data ornop yang tersimpan dalam pangkalan data kami.

Pangkalan Data Regional

<https://smeru.or.id/en/resources/regional-database>

Pangkalan Data Regional berisi indikator penting tentang wilayah Indonesia yang telah dihimpun SMERU, termasuk rangkaian Peta Kemiskinan Indonesia–tahun 2000, 2010, dan 2015–serta data regional lain yang digunakan dalam berbagai penelitian SMERU. Pengguna dapat mencari data tentang berbagai wilayah Indonesia yang disaring berdasarkan sejumlah indikator, seperti kondisi ketimpangan, kemiskinan, aset alam, aset keuangan, dan aset sosial, sesuai dengan tingkat wilayah, dari provinsi hingga desa.

Program RISE di Indonesia

<https://rise.smeru.or.id/>

Program Research on Improving Systems of Education (RISE) di Indonesia dikelola dan dipimpin SMERU. Program ini merupakan bagian dari Program RISE global yang mendukung peningkatan pembelajaran siswa di seluruh dunia. Program RISE dilaksanakan di tujuh negara: Ethiopia, India, Indonesia, Nigeria, Pakistan, Tanzania, dan Vietnam. Program RISE di Indonesia melakukan penelitian longitudinal yang mengkaji reformasi guru di tingkat nasional dan inovasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah.



JEJARING

JEJARING PENDANAAN

PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Sosial
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Pemerintah Kabupaten Situbondo
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

SWASTA






















PT Amman Mineral Nusa Tenggara
PT Riau Andalan Pulp and Paper

MITRA PEMBANGUNAN





Agence Française de Développement
Asian Development Bank
Asian Development Bank Institute
BASAbali Foundation
Blavatnik School of Government, University of Oxford
Center for the Implementation of Public Policies for Equity and Growth (CIPPEC)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)
Development Pathways
Digital Pathways at the University of Oxford
Ford Foundation
Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK)
Knowledge Sector Initiative (KSI) - The Australian Government's Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) - The Australian Government's DFAT
Kurawal Foundation
Menuju Masyarakat Indonesia yang Kokoh Sejahtera (MAHKOTA) - The Australian Government's DFAT
Monash University
RISE Programme - United Kingdom's Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), the Australian Government's DFAT, and the Bill & Melinda Gates Foundation
Tanoto Foundation
The University of Chicago
UNICEF
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)
United Nations Population Fund (UNFPA)
Yayasan Madani Berkelanjutan
Yayasan Save the Children Indonesia
The World Bank

JEJARING BUKAN PENDANAAN





























UNIVERSITAS, LEMBAGA PENELITIAN, DAN JEJARING INTERNASIONAL

-  Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD)
-  Australia-Indonesia Centre
-  Australian Consortium for 'In-Country' Indonesian Studies (ACICIS)
-  Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
-  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)
-  Indian Council for Research on International Economic Relations
-  Institut Teknologi Bandung (ITB)
-  Konsorsium Riset SDGs Nusa Tenggara
-  Mathematica Policy Research
-  Mitra Pendidikan Indonesia (MPI)/ Local Education Group (LEG)
-  Politeknik Negeri Bandung
-  The Australian National University (ANU) Indonesia Project
-  The Global Solutions Initiative
-  The University of Melbourne
-  Universitas Airlangga
-  Universitas Gadjah Mada
-  Universitas Indonesia
-  Universitas Lampung
-  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
-  Universitas Padjadjaran
-  Women's World Banking



LEGENDA

-  MASUKAN KEBIJAKAN
-  KOLABORASI PROYEK
-  AKTIVITAS BERBAGI PENGETAHUAN
-  PELATIHAN/PENINGKATAN KAPASITAS





PEMERINTAH PUSAT

-  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
-  Badan Kepegawaian Negara
-  Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-  BPJS Ketenagakerjaan
-  Direktorat Ketenagakerjaan, Bappenas
-  Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Bappenas
-  Deputi Bidang Ekonomi, Bappenas
-  Dewan Pertimbangan Presiden
-  Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Bappenas
-  Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Bappenas
-  Direktorat Pembangunan Daerah, Bappenas
-  Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Bappenas
-  Kantor Staf Presiden
-  Kementerian Komunikasi dan Informatika
-  Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
-  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
-  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
-  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
-  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
-  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
-  Suku Dinas Kebudayaan Kota Jakarta Pusat
-  Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Pusat
-  Suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta Pusat
-  Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
-  Komisi X DPR RI
-  Ikatan Guru Indonesia
-  Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek, Bappenas
-  Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik




PEMERINTAH DAERAH

-  Bappeda Nusa Tenggara Barat
-  Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan, Bappedalitbang Kayong Utara
-  Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
-  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kayong Utara
-  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal
-  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi
-  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
-  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatra Barat
-  Bappeda Kabupaten Ketapang
-  Pemerintah Kabupaten Situbondo
-  Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
-  Pemerintah Provinsi Jawa Timur
-  Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
-  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat
-  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor
-  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon

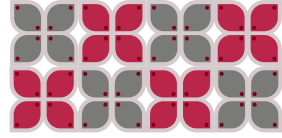
ALIANSI

-  Aliansi Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (PKTA)
-  Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK)
-  Partnership for Action against Child Labour in Agriculture (PAACLA) Indonesia
-  Pokja 5 Community of Practice Lembaga Riset Independen (LRI)—jejaring lembaga-lembaga yang sebelumnya didukung KSI—lembaga penelitian kebijakan

SWASTA

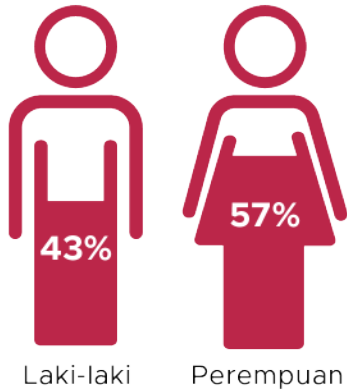
-  Angel Investment Network Indonesia (ANGIN)
-  Google LLC
-  PT Waste4change Alam Indonesia



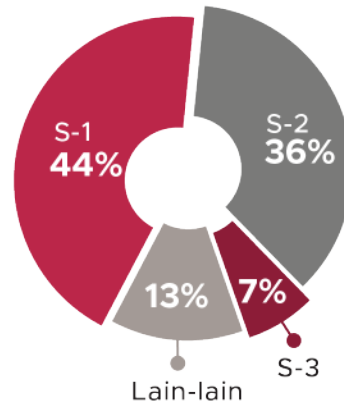


PROFIL STAF

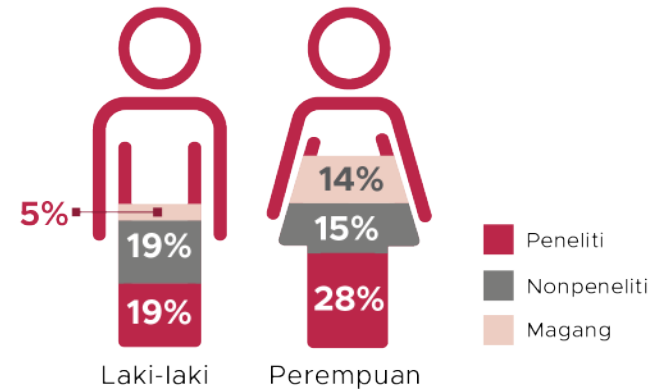
Komposisi Staf Berdasarkan Gender



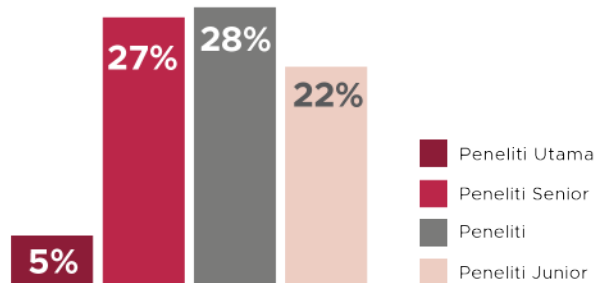
Komposisi Staf Berdasarkan Pendidikan



Komposisi Staf Berdasarkan Posisi dan Gender

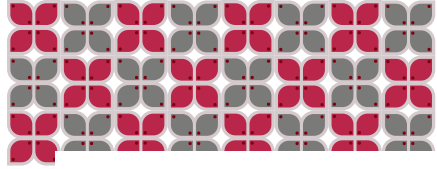


Komposisi Peneliti Berdasarkan Status Kepegangatan

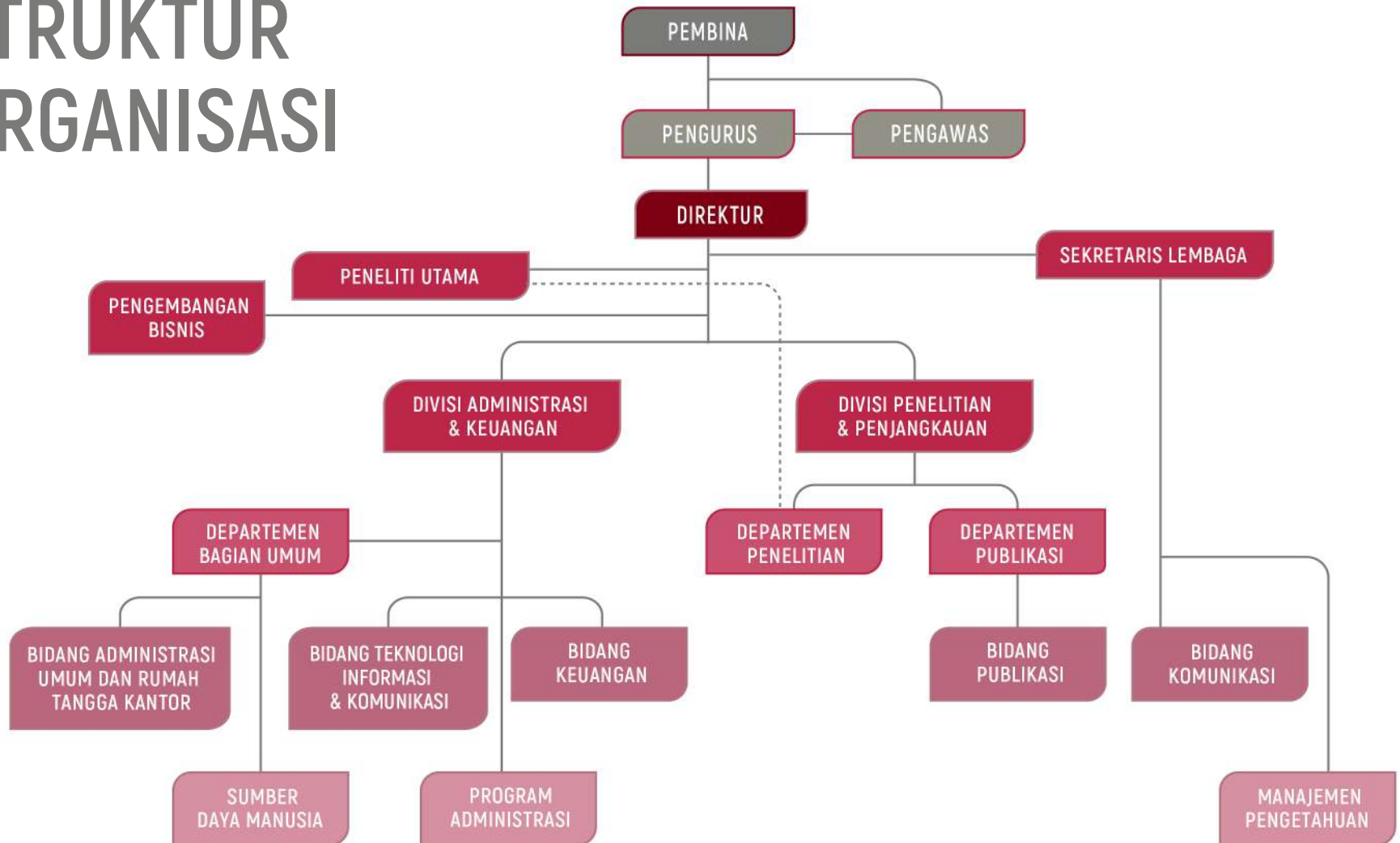


Sebaran Peneliti Lokal dan Enumerator Berdasarkan Domisili



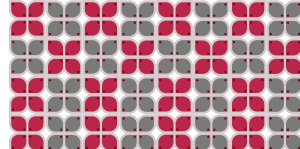


STRUKTUR ORGANISASI





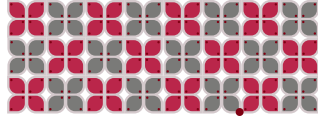
Keluarga besar The SMERU Research Institute



YAYASAN SMERU

Laporan Aktivitas & Perubahan Aset Bersih per 31 Desember 2022 dan 2021

	2022 (Unaudited)			2021 (Unaudited)
	Terikat temporer	Tidak terikat	Terikat permanen	Jumlah/ Total
Penerimaan				
Penerimaan dari donor	31.109.816.956	-	-	31.109.816.956
Penerimaan dari lain-lain		1.371.886.173	-	1.371.886.173
Jumlah penerimaan	31.109.816.956	1.371.886.173	-	32.481.703.129
Pengeluaran				
Beban program	38.867.948.270	-	-	38.867.948.270
Beban operasional	-	1.714.005.610	-	1.714.005.610
Beban penyusutan	-	360.556.326	-	360.556.326
Beban lain-lain	-	-	-	-
Jumlah pengeluaran	38.867.948.270	2.074.561.936	-	40.942.510.206
Kenaikan (Penurunan)				
Aset Bersih	(7.758.131.314)	(702.675.763)	-	(8.460.807.077)
Aset Neto Awal Tahun	54.937.635.284	(32.536.546.701)	118.585.503	22.519.674.086
Koreksi Aset Neto Awal Tahun (untuk belum dimasukkan jumlah biaya cadangan <i>employment benefit</i> tahun lalu 2020-2021)				-
Aset Bersih Akhir Tahun	47.179.503.970	(33.239.222.465)	118.585.503	22.519.674.086

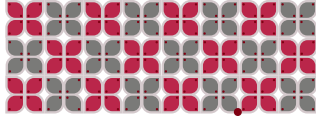


YAYASAN SMERU

Laporan Arus Kas per 31 Desember 2022 dan 2021

	2022 (Unaudited)	2021 (Unaudited)
Arus kas dari aktivitas operasi		
Perubahan aset bersih	(8.460.807.077)	(5.841.437.347)
Koreksi aset bersih tahun lalu	(87.513.764)	
Penyesuaian untuk merekonsiliasi kelebihan penerimaan atas pengeluaran pada kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi:		
Penyusutan	360.556.326	286.001.244
Laba/rugi yang belum direalisasi atas Investasi	-	-
Penurunan (peningkatan) pada:		
Uang muka	(366.080.786)	390.000.048
Piutang	1.627.393.114	(1.135.619.821)
Biaya dibayar dimuka	(348.579.475)	193.060.018
Utang pajak	(445.567.750)	71.920.644
Biaya yang masih harus dibayar	-	-
Utang Donor	-	-
Utang lain-lain	-	(71.057.560)
Kewajiban imbalan kerja	243.250.000	591.292.135
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	(7.477.349.412)	(5.515.840.639)
Arus kas dari aktivitas investasi		
Penjualan investasi	5.490.905.622	10.579.936.969
Penempatan pada investasi	-	(6.540.804.331)
Perolehan aset tetap dan <i>inventory</i>	(176.280.300)	(165.084.000)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	5.314.625.322	3.874.048.638
kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	(2.162.724.090)	(1.641.792.001)
Kas dan setara kas, awal	7.223.725.994	8.865.517.995
Koreksi	-	-
Kas dan setara kas, akhir	5.061.001.904	7.223.725.994



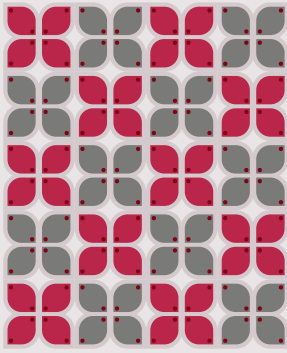


YAYASAN SMERU

Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2022 dan 2021

	2022 <i>(Unaudited)</i>	2021 <i>(Unaudited)</i>
ASET		
Aset lancar		
Kas dan setara kas	5.061.001.904	7.223.725.994
Investasi jangka pendek	5.089.031.347	10.579.936.969
Uang muka	1.338.750.907	972.670.121
Piutang lain-lain	180.000.000	1.807.393.114
Biaya dibayar dimuka	473.394.475	124.815.000
Jumlah aset lancar	12.142.178.633	20.708.541.198
Aset tidak lancar		
Aset tetap - bersih	8.000.099.453	8.096.861.715
Jumlah aset tidak lancar	8.000.099.453	8.096.861.715
Jumlah aset	20.142.278.086	28.805.402.913
LIABILITAS DAN ASET BERSIH		
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang pajak	171.411.078	616.978.828
Kewajiban imbalan kerja	5.912.000.000	5.668.750.000
Jumlah kewajiban	6.083.411.078	6.285.728.828
Aset bersih		
Tidak terikat	(33.239.222.465)	(32.536.546.701)
Terikat temporer	47.179.503.970	54.937.635.284
Terikat permanen	118.585.503	118.585.503
Jumlah aset bersih	14.058.867.008	22.519.674.085
Jumlah kewajiban dan aset bersih	20.142.278.086	28.805.402.913

MOTIF BATIK KAWUNG



Motif batik kawung bermakna kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian. Motif batik ini diyakini diciptakan oleh salah satu sultan Kerajaan Mataram. Motif kawung pertama kali dikenal pada abad ke-13 di Pulau Jawa. Pada awalnya, motif kawung muncul pada ukiran dinding di beberapa candi di Jawa, seperti Prambanan. Dalam kaitannya dengan kata *suwung* yang berarti kosong, motif kawung menyimbolkan kekosongan nafsu dan hasrat duniawi yang kemudian melahirkan pengendalian diri nan sempurna. Kekosongan ini menjadikan seseorang *netral*, tidak berpihak, tidak ingin menonjolkan diri, mengikuti arus kehidupan, dan membiarkan segala yang ada di sekitarnya berjalan sesuai dengan kehendak alam. Kain batik dengan motif kawung selalu dikenakan Semar sebagai simbol sosok yang bijaksana.

Sumber: <https://budaya.jogjaprovo.go.id/>

PENGARAH

✦ Widjajanti Isdijoso

DEWAN REDAKSI

✦ Athia Yumna

✦ Heni Kurniasih

✦ Hesti Marsono

✦ Liza Hadiz

✦ Mirna Wildani

✦ Niken Kusumawardhani

✦ Yudi Suwarna

TIM PENYUSUN

Koordinator:

✦ Alia An Nadhiva

Anggota:

✦ Asep Kurniawan

✦ Hafiz Arfyanto

✦ M. Harits Kamaaluddin

✦ Novita Eka Syaputri

✦ Ratri Indah Septiana

✦ Rini Kusnadi

✦ Ruhmaniyati

Editor:

✦ Budhi Adrianto

✦ Gunardi Handoko

✦ Muhammad Gabriell
Firdausy Erfan

✦ Wiwin Purbaningrum

Desainer Grafis:

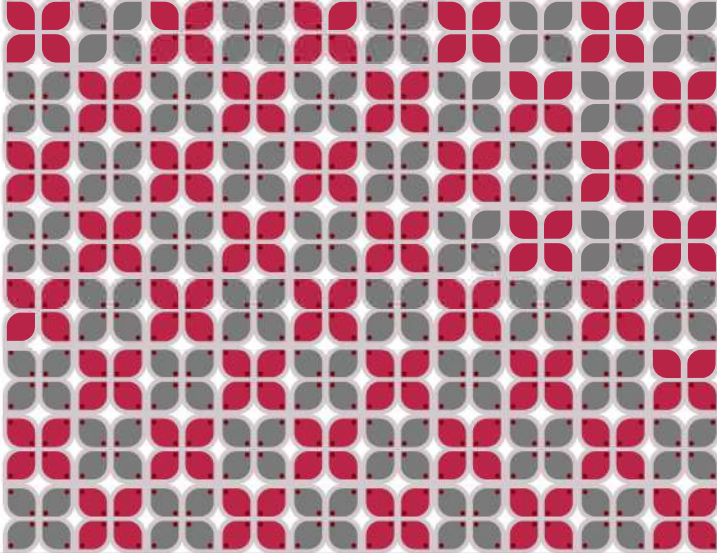
✦ Novita Maizir

Staf Distribusi:

✦ Hariyanti Sadaly


Foto Sampul

✦ M. Harits Kamaaluddin



smeru
RESEARCH INSTITUTE

 Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330, Indonesia

 +6221 3193 6336;
+6221 3193 0850 (fax)

 smeru@smeru.or.id

 smeru.or.id



9 772597 881003

